

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENSUKSESKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) DI KECAMATAN  
BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**ATIKA DZULKHIJANA**

**NIM. 12020110110009**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Atika Dzulkhijiana  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110009  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP  
Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENSUKSESKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) DI KECAMATAN  
BANYUBIRU KABUPATEN  
SEMARANG**  
Dosen Pembimbing : Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D

Semarang, 30 Januari 2015  
Dosen Pembimbing,

Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D  
NIP. 19620212 198703 1024

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Atika Dzulkhijiana  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110009  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENSUKSESKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) DI KECAMATAN  
BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Maret 2015

### Tim Penguji

1. Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D (.....)
2. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D (.....)
3. Mayanggita Kirana, S.E, M.Sc (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE, M.com.,Ph.D, Akt  
NIP. 196708091992031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Atika Dzulkhijiana

NIM : 12020110110009

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Saya mengakui karya Skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari Dosen Pembimbing saya yaitu Prof. Drs. Waridin, MS, Ph.D. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2015  
Yang membuat pernyataan

(Atika Dzulkhijiana)  
NIM : 12020110110009

## **ABSTRACT**

*PPIP program in Semarang district is one form of government policy in tackling poverty and is expected to boost the economy in a region particularly in rural areas. PPIP is a community-based program under the auspices of the PNPM Mandiri, the component activities include facilitation and mobilization of society so as to perform the identification problem of availability and access to basic infrastructure, planning and implementing the construction of basic infrastructure. One of these PPIP program in Banyubiru District is a participatory development program intended to reduce inequality region and create independence of rural communities in the development of infrastructure in Banyubiru District. This study aims to determine the community's participation in the success of the PPIP program and know the value of willingness to pay (WTP) by a community. This is proved through the analysis of public perception, the intensity of public participation and the value of willingness to pay (WTP) in Banyubiru District community.*

*The research method used descriptive statistics analysis techniques and contingent valuation method (CVM) approach. Descriptive statistics explain public perceptions and intensity of community participation in Banyubiru District. CVM approach used determine the value of WTP with sample 125 respondents in Banyubiru District.*

*The results of this study indicate that the perception of the public before and after the PPIP program is considered good for the development of the village, agglomeration and information technology in rural environments. The level of participation in the form of outpouring of time, effort, money, consumption, participation of village organizations, trust between citizens, working together and security assessed fairly. The average value of WTP obtained is Rp. 5100.00 that community are willing to give to make the PPIP program successful. However, the average value of WTP were insufficient budget for maintenance and implementation of the PPIP program sustainably, so it requires a strategy that should be made include adding cash village, dues for people that have a vehicles, and contributions from businessmen.*

*Keywords: Participation, Willingness to pay, Sustainability, Infrastructure, Contingent Valuation Method, Semarang*

## ABSTRAK

Program PPIP di Kabupaten Semarang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian disuatu daerah khususnya daerah pedesaan. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat dibawah naungan PNPM mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan indentifikasi masalah ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Salah satunya program PPIP di Kecamatan Banyubiru adalah sebagai program pembangunan partisipatif yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menciptakan kemandirian masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Banyubiru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program PPIP dan mengetahui besarnya nilai willingness to pay (WTP) yang diberikan masyarakat.

Metode penelitian menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan pendekatan *Contingent Valuation Method* (CVM). Statistik deskriptif menjelaskan persepsi masyarakat dan intensitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Banyubiru. Pendekatan CVM digunakan untuk menentukan nilai WTP dengan sampel 125 responden di Kecamatan Banyubiru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sebelum dan sesudah program PPIP dinilai bagus yaitu terhadap perkembangan desa, aglomerasi dan teknologi informasi di lingkungan pedesaan. Tingkat partisipasi dalam bentuk curahan waktu, tenaga, uang, konsumsi, keikutsertaan organisasi desa, kepercayaan antar warga, bekerja bersama-sama dan keamanan dinilai cukup. Rata-rata nilai WTP yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 5.100,00 yang masyarakat bersedia berikan untuk mensukseskan program PPIP. Akan tetapi, rata-rata nilai WTP tersebut belum mencukupi anggaran untuk pemeliharaan dan pelaksanaan program PPIP secara berkelanjutan, sehingga memerlukan strategi yang harus dilakukan diantaranya adalah penambahan uang kas desa, iuran bagi masyarakat yang memiliki kendaraan, dan kontribusi dari pebisnis.

Kata Kunci : Partisipasi, *Willingness to pay*, Keberlanjutan, Infrastruktur, *Contingent Valuation Method*, Semarang

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah rabbil'alamin kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir pada program studi Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi tidak lepas dari dukungan, dorongan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. Waridin, MS., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa memberikan arahan dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing karena sudah mendapatkan fasilitas menggunakan kerangka konsep analisis dari penelitian Dikti (Hibah Kompetensi) yang diketuai oleh Prof. Drs. Waridin, MS., Ph.D.
3. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Mayanggita Kirana,S.E.,M.Si yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Darwanto,S.E.,M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan penulis.
6. Dr. Hadi Sasana,S.E.,M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si, selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu dosen jurusan IESP yang tidak pernah lelah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalankan proses kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Bapak dan Mama tercinta (Kasnawi dan Nuryati) yang selalu menyayangi dan mendo'akan penulis selama lebih dari empat tahun dalam menyelesaikan pendidikan dan tidak pernah lelah dalam mendukung penulis baik secara finansial dan dukungan moral. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.
10. Adiku tercinta (Andika Sofyandi) dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, do'a, nasihat, dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mbak Izzati, Mas Jamal (Alm), Mas Ali, dan Mbak Ani yang telah menjadi keluarga dekat selama penulis berada di Semarang.

12. Martha Caesaratih sahabat yang selama lebih dari empat tahun menemani baik suka maupun duka, tempat bertukar pikiran, dan berjuang bersama di kos dan kelas semoga kita selalu dimudahkan dalam meraih kesuksesan.
13. Iga Anjar Prihandayani sahabat yang telah memberikan motivasi, semangat, bantuan ketika penulis mengalami kesulitan dan selalu ada disaat apapun. Terima kasih untuk keluarganya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan pada penulis.
14. Tito Aditya Perdana yang telah menjadi partner seperjuangan, memberikan bantuan, semangat dan do'a pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman IESP Pipit, Nisa, Eta, Bram, Ari, Kunto, Anas, Agil, Desi dan teman-teman IESP R1 2010 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih selama empat tahun berproses bersama dan kisah-kisah suka maupun duka yang akan menjadi kenangan dan tidak akan pernah terlupakan.
16. Teman-teman bimbingan Intan, Dandy, Rini, Eka, Mbak Valen, yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2010 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
18. *Princes-princes My House* 165 Igi, Monic, Candra, Anggun, Evin, Aul, Gustin, Nisa, Dewi, Vindi, Mbak Sonya, Mbak Asti, Mbak Eksa, Mbak

Dias, Mbak Anya, Mbak Pera (Almh), Mbak Gusta, yang telah memberikan kehangatan sebagai keluarga baru, canda, tawa dan tangis selama lebih dari empat tahun akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Dan terima kasih untuk adik-adik angkatan 2013-2014 Lela, Rahma, Hastin, Raysa, Sania, Elga dan Tika yang telah memberikan semangat pada penulis.

19. Sahabat-sahabatku Novi, Dita, Yosi, Tiffany, Fadly, Siska, Teti yang telah memberikan semangat disela-sela kesibukan kalian untuk penulis.
20. Seluruh staff dan pegawai dilingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
21. Dinas Cipta Karya Jawa Tengah (Bapak Anung), Satker Jawa Tengah (Bapak Riyadi), Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang (Bapak Sabarto dan Bapak Farid), Fasilitator Teknik (Bapak Rino), Fasilitator Pemberdayaan (Bapak Achmad) dan Bappeda Kabupaten Semarang (Bapak Aji Widiyanto) yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
22. Kepala Desa Kebumen dan Kepala Desa Banyubiru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis.
23. Masyarakat Desa Kabumen dan Banyubiru sebagai responden telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
24. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a, bantuan, dan motivasi baik secara

langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang diberikan oleh pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan yang akan digunakan menjadi penelitian selanjutnya. Penulis juga senantiasa mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 30 Januari 2015  
Penulis,

Atika Dzulkhijiana

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	20
2.1. Landasan Teori.....	20
2.1.1. Teori Barang Publik .....	20
2.1.2. Permintaan Barang Publik.....	22
2.1.3. Teori Perilaku Konsumen.....	25
2.1.3.1 Nilai Utilitas .....	25
2.1.3.2 Utilitas Marjinal .....	26
2.1.4. Eksternalitas .....	27
2.1.5. Partisipasi Masyarakat.....	33
2.1.6. Konsep Partisipasi Masyarakat .....	36
2.1.7. Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	39
2.1.8. Pemberdayaan Masyarakat.....	41
2.1.8.1 Konsep Pemberdayaan .....	41
2.1.8.2 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat .....	43
2.1.8.3 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat .....	44
2.1.8.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	49
2.1.9. Paradoks Abilene : <i>Management of Agreement</i> .....	50
2.1.9.1 Gejala Paradoks Abilene .....	51
2.1.9.2 Mengatasi Paradoks Abilene .....	53

2.1.10. Konsep <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM) .....	54
2.1.11. Kesiediaan Untuk Membayar atau Willingness to Pay (WTP).....	56
2.1.12. Menentukan Nilai Willingness To Pay .....	57
2.2. Penelitian Terdahulu .....	60
2.3. Kerangka Pemikiran .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	68
3.2 Populasi dan Sampel .....	70
3.2.1 Populasi .....	70
3.2.2 Sampel.....	70
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	72
3.3.1 Data Primer .....	72
3.3.2 Data Sekunder .....	72
3.4 Metode pengumpulan Data .....	73
3.5 Metode Analisis.....	74
3.5.1 Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap PPIP.....	74
3.5.2 Analisis Intensitas Partisipasi Masyarakat .....	75
3.5.3 Analisis Besarnya Nilai WTP .....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	80
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Wilayah .....	80
4.1.1.1 Kabupaten Semarang.....	80
4.1.1.2 Kecamatan Banyubiru .....	81
4.1.2 Kondisi Fisik Wilayah.....	82
4.1.3 Deskripsi Karakteristik Responden.....	84
4.2 Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai PPIP.....	87
4.3 Analisis Intensitas Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mensukseskan PPIP .....	91
4.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Curah Waktu.....	92
4.3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Swadaya.....	93
4.3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Sosial Masyarakat.....	94
4.3.4 Partisipasi <i>Stakeholders</i> dalam Kegiatan PPIP .....	96
4.4 Analisis Besarnya Nilai WTP dalam Mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru .....	98
4.5 Deskripsi Behavioural Terhadap Besarnya Nilai WTP.....	107
4.6 Evaluasi Besaran Nilai Willingness to pay (WTP) .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
5.1 Simpulan.....	113
5.2 Saran.....	114
5.3 Keterbatasan .....	116

DAFTAR PUSTAKA .....	117
LAMPIRAN.....	123

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Indonesia.....	2
Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia .....	3
Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Jawa Tengah.....	6
Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah) .....	10
Tabel 2.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein .....	39
Tabel 2.2 Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat .....	50
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	64
Tabel 3.1 Rincian Jumlah Responden untuk 2 (dua) Desa Lokasi Penelitian.....	71
Tabel 3.2 Rincian Jumlah Keyperson.....	72
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan .....	81
Tabel 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	84
Tabel 4.3 Persepsi Masyarakat Sebelum Dan Sesudah PPIP (n=125) .....	88
Tabel 4.4 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Curah Waktu.....	92
Tabel 4.5 Bentuk Swadaya Masyarakat .....	93
Tabel 4.6 Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Sosial Masyarakat .....	94
Tabel 4.7 Evaluasi Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Kegiatan PPIP .....	96
Tabel 4.8 Estimasi Biaya Investasi dan Tawaran Untuk WTP .....	100

Tabel 4.9	Distribusi Nilai WTP Responden.....	106
Tabel 4.10	Hasil Total WTP.....	107
Tabel 4.11	Anggaran Pemeliharaan Dan Keberlanjutan PPIP Di Kecamatan Banyubiru .....	110
Tabel 4.12	Estimasi Biaya Dalam Upaya Mengatasi Kondisi Defisit .....	112

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konsumen Menentukan Pilihan Kuantitas dalam Barang Pribadi .....	22
Gambar 2.2 Kesiediaan Membayar Konsumen yang Berbeda dalam Satu Tingkat Output .....	23
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran .....	67
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian .....	83
Gambar 4.2 Evaluasi Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Kegiatan PPIP .....	97
Gambar 4.3 Nilai WTP yang Ditawarkan .....	105

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian .....	124
Lampiran B Data Mentah Responden .....	136
Lampiran C Ilustrasi Tahapan CVM Dalam Menentukan Nilai WTP.....	143
Lampiran D Dokumentasi .....	144
Lampiran E Daftar Riwayat Hidup .....	149

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2009).

Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas atau sempit). Hal itu ditunjukkan sesuai Data Sensus Penduduk pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perdesaan yaitu sebanyak 119 juta jiwa atau 50,21 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2009). Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah di Indonesia, pada bulan Maret 2012 September 2012.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Daerah di Indonesia, Maret 2012 September 2012**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2012	10,65	8,78
September 2012	10,51	8,60
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2012	18,48	15,12
September 2012	18,08	14,70
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2012	29,13	11,96
September 2012	28,59	11,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Menurut Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) bulan September 2012 di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,14 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2012 menjadi 10,51 juta orang pada September 2012), sementara di perdesaan berkurang 0,40 juta orang (dari 18,48 juta orang pada Maret 2012 menjadi 18,08 juta orang pada September 2012). Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan masih banyak dibandingkan di perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan di perdesaan perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang berada di perdesaan. Sedangkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Pulau di Indonesia, September 2012**

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2.049,64	4.127,54	6.177,18	9,93	12,88	11,72
Jawa	7.119,22	8.703,35	15.822,57	8,67	15,05	11,31
Bali dan Nusa Tenggara	626,02	1.363,55	1.989,57	11,75	16,55	14,66
Kalimantan	254,60	678,33	932,93	4,17	8,18	6,48
Sulawesi	337,09	1.708,50	2.045,59	5,59	14,36	11,41
Maluku dan Papua	121,20	1.505,06	1.626,80	6,11	31,67	24,41
Indonesia	10.507,77	18.086,87	28.594,64	8,60	14,70	11,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kota dan Desa menurut pulau pada September 2012 terbesar masih berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24,41 persen, sementara persentase penduduk miskin Kota dan Desa terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,48 persen. Di lihat dari jumlah penduduk miskin menurut pulau, sebagian besar penduduk miskin Kota dan Desa masih berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 15.82 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin Kota dan Desa terendah berada di Pulau Kalimantan 0,93 juta orang. Menurut data tersebut Pulau Jawa termasuk pulau dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 8,7 juta orang dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa pulau Jawa perlu adanya upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, antara lain: Program Kompensasi

Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, *Rural Infrastructure Support* (RISP) pada tahun 2006 serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang (Pedoman PPIP, 2013).

Diantara program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, ada salah satu program yang masih dijalankan sampai sekarang, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desa. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses menuju infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta rencana pengelolaannya. Disamping itu dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya maka diharapkan terjadi percepatan proses kemandirian masyarakat dan terwujudnya sinergi berbagai pelaku pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Menurut Adisasmita (2006) partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Anggaran dana pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek dalam masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (perdesaan).

Dengan adanya partisipasi masyarakat, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) menjadi lebih terarah, artinya program disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah yang bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 2,97 juta orang pada bulan Maret (16,89 persen) dan menurun 2,91 juta persen pada bulan September (16,55 persen). Berikut adalah rincian jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah di provinsi Jawa Tengah bulan Maret 2012-September 2012.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah**  
**di Provinsi Jawa Tengah, Maret 2012-September 2012**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2012	2.001,12	13,49
September 2012	1.946,51	13,11
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2012	2.976,25	16,89
September 2012	2.916,90	16,55
<u>Kota + Desa</u>		
Maret 2012	4.977,36	15,34
September 2012	4.863,41	14,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dapat dilihat pada Tabel 1.3 bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan cenderung menurun dari 2,97 juta orang sampai 2,91 juta orang. Sedangkan di perkotaan juga cenderung dari 2,00 juta orang sampai 1,94 juta orang. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan.

Selain itu, kondisi infrastruktur di daerah pedesaan juga perlu diperhatikan, terutama adalah jalan pedesaan. Menurut Basri dan Munandar

(2009) tersedianya infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, akan dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat. Pengadaan infrastruktur akan mempengaruhi secara positif perkembangan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan.

Oleh karena itu, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah program yang sangat baik dalam upaya pembangunan desa di Indonesia khususnya yang memiliki infrastruktur yang rendah. Menurut Barrios (2008) menyatakan bahwa infrastruktur jalan perdesaan sebagai akses dari jaringan jalan utama bagi masyarakat perdesaan atau area produksi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan akses jalan bagi individu yang berada di perdesaan agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan sehari-hari.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah merupakan kabupaten yang masih memiliki penduduk miskin dan kondisi infrastruktur yang masih cukup rendah dibandingkan dengan Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Temanggung, hal ini sesuai dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Kabupaten Semarang memiliki pola perekonomian industri dimana sebagian besar masyarakatnya menyangankan hidupnya di bidang industri pengolahan. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Pola seperti ini masih dominan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi sektor industri pada tahun 2010 sebesar 42,82 persen dari jumlah PDRB Kabupaten Semarang hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Kondisi perekonomian daerah diwujudkan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur hasil pembangunan. Gambaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam penyajian data PDRB. PDRB Kabupaten Semarang tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar 13.845,50 milyar rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 6.223,19 milyar rupiah dengan pendapatan per kapita Rp 12.769.811,00 atas dasar harga berlaku sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 5.748.976,00.

Dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan lebih bisa menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena dalam perhitungan atas dasar harga konstan yang dihitung adalah hasil produksinya, tanpa melihat adanya perubahan harga yang terjadi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang empat tahun terakhir sudah menunjukkan angka yang cukup bagus, dimana laju pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran angka di atas 4

persen, bahkan di Tahun 2012 pertumbuhannya sudah mencapai angka diatas 6,02 %. Dapat dilihat kontribusinya pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 10,57 persen, disusul sektor pertanian yang tumbuh 8,28 persen dan sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,20 persen. Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai kontribusi kecil adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa-jasa, lembaga keuangan dan jasa perusahaan, listrik, gas dan air bersih, industri, angkutan dan komunikasi dan yang terendah terjadi disektor penggalian sebesar -5,52 persen.

Perkembangan PDRB secara regional dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat diketahui bahwa sektor yang paling tinggi mendukung perkembangan ekonomi Kabupaten Semarang adalah sektor indutri pengolahan yaitu sebesar 43,65% pada tahun 2008 dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya, akan tetapi sektor tersebut merupakan sektor yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain. Sedangkan sektor yang paling rendah dalam mendukung perkembangan ekonomi Kabupaten Semarang adalah sektor petambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,12 persen. Mengingat bahwa Kabupaten Semarang memiliki kondisi wilayah dengan dataran tinggi, maka kegiatan pertambangan dan penggalian sangat sedikit.

**Tabel 1.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pertanian	1.354.111,8	14.8	1.490.281,0	14.80	1.657.509,4	14.97	1.826.998,8	14.81	2.095.447,4	15.31
2.	Pertambangan dan Penggalian	11.163,8	0.12	12.280,4	0.12	14.234,4	0.13	15.614,5	0.13	16.082,8	0.12
3.	Industri Pengolahan	4.052.317,2	43.65	4.364.042,7	43.35	4.741.111,7	42.82	5.275.113,5	42.76	5.857.444,6	42.31
4.	Listrik, Gas dan Air	121.282,7	1.31	130.744,8	1.30	146.108,6	1.32	172.225,8	1.40	181.203,5	1.31
5.	Konstruksi	372.681,1	4.01	390.250,8	3.88	440.177,7	3.98	497.403,9	4.03	558.197,7	4.03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.915.822,9	20.63	2.070.685,2	20.57	2.285.795,3	20.65	2.537.697,2	20.57	2.855.701,2	20.63
7.	Angkutan dan Komunikasi	248.784,3	2.68	267.111,6	2.65	288.303,5	2.60	341.116,2	2.77	372.043,0	2.69
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	372.326,8	4.01	421.871,2	4.19	465.987,0	4.21	519.388,4	4.21	579.718,0	4.19
9.	Jasa-jasa	836.017,0	9.00	919.577,7	9.13	1.032.381,7	9.32	1.149.888,1	9.32	1.329.657,9	9.60
	<b>JUMLAH PDRB</b>	<b>9.284.507,6</b>	<b>100.00</b>	<b>10.066.845,5</b>	<b>100.00</b>	<b>11.071.609,3</b>	<b>100.00</b>	<b>12.335.446,5</b>	<b>100.00</b>	<b>13.845.496,2</b>	<b>100.00</b>
	Penduduk Jawa Tengah (jiwa)	911.233,0		915.398,0		913.137,0		936.058,0		914.374,0	
	PDRB Perkapita (Rp)	10.189.062,0		10.997.233,4		11.890.419,3		13.178.079,3		14.707.752,9	
	Pendapatan Perkapita	8.895.646,9		9.621.069,9		10.299.214,2		11.890.419,3		12.769.810,9	

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2013

Selain uraian Tabel 1.4 diatas hal lain yang dapat dilihat dari penyusunan PDRB Tahun 2008-2012 adalah indikator pendapatan perkapita. Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Semarang menunjukkan perubahan yang cukup baik setiap tahunnya, dimana pendapatan per kapita Tahun 2008 merupakan pendapatan perkapita terendah yaitu sebesar Rp 8.895.646,00 dan pendapatan perkapita tertinggi adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 12.769.810,00.

Dalam meningkatkan perekonomian daerah dibutuhkan partisipasi masyarakat yaitu dengan diadakannya program pemerintah salah satunya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Semarang. Program ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat perdesaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan mengenai infrastruktur di perdesaan.

#### **1.1.1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)**

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. PPIP berada di bawah payung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan komponen kegiatannya meliputi kegiatan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk minoritas terhadap

pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

PPIP yang dilatarbelakangi semangat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan ini merupakan program lanjutan dari program pembangunan infrastruktur pedesaan sebelumnya. Sebelum dimulainya program PPIP tahun 2007, Ditjen Ciptakarya memiliki program-program pembangunan infrastruktur pedesaan dalam bentuk kegiatan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak di bidang infrastruktur pedesaan (PKPS-BBMIP) pada tahun 2005, *Rural Infrastructure Support Program* (RISP) pada tahun 2006. Namun berbeda dengan program sebelumnya, PPIP mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya. Dan dalam pelaksanaannya, PPIP dilaksanakan oleh Satuan Kerja PIP Kabupaten yang berkoordinasi dengan Satker PIP Provinsi dan Tim Koordinasi serta Tim Pelaksana Kabupaten (Pedoman PPIP, 2013).

Sebagai program nasional, PPIP dilaksanakan di 29 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dengan sasaran lokasi yang terus bertambah setiap tahunnya. Adapun PPIP meliputi komponen kegiatan antara lain : 1) penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat; 2) peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui bantuan langsung masyarakat (BLM); 3) peningkatan kapasitas pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan pendekatan program pembangunan infrastruktur pedesaan adalah : 1) pemberdayaan masyarakat, dimana seluruh proses kegiatan baik tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan melibatkan

peran aktif masyarakat; 2) Keberpihakan pada yang miskin, yaitu orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasilnya diupayakan dapat berdampak langsung pada penduduk miskin; 3) otonomi dan desentralisasi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur; 4) partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses kegiatan dan memberikan kesempatan partisipasi aktif dari kelompok miskin, kaum perempuan, dan minoritas; 5) keswadayaan; 6) keterpaduan program pembangunan, yang berarti program dilaksanakan dengan terintegrasi dengan program pembangunan perdesaan lainnya; 7) penguatan kapasitas kelembagaan; serta 8) kesetaraan dan keadilan gender.

Sesuai dengan arahan pedoman pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan, program ini dilaksanakan dengan salah satunya adalah mengedepankan integrasi dengan program-program terkait. Sehingga meskipun dilaksanakan secara partisipatif, program ini juga harus memperhatikan kebijakan pembangunan kawasan. Seperti misalnya pada rencana tata ruang pengembangan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

Dalam pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Semarang, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan PPIP. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam PPIP yaitu dimulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan serta rencana

pengelolaannya. Dukungan dari pemerintah dan juga adanya kelembagaan PPIP berupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat serta mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama PPIP dan penerima manfaat hasil pembangunan. Selain itu masyarakat mendapatkan pendampingan dari fasilitator teknik dan fasilitator pemberdayaan, agar masyarakat lebih terarah dalam menjalankan program ini. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan mekanisme dalam pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi.

Pendekatan partisipasi dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dilakukan, karena pembangunan infrastruktur dilakukan pada lingkup desa, yang dalam pengambilan keputusan terhadap prioritas kegiatan seluruhnya ditentukan oleh masyarakat pada forum musyawarah desa. PPIP diharapkan menjadi salah satu program pembangunan partisipatif yang dapat berkontribusi bagi perbaikan akses dan peningkatan kemandirian masyarakat Kabupaten Semarang. Pelaksanaan PPIP berdasarkan petunjuk pelaksanaan PPIP yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur pedesaan dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kecamatan Banyubiru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang mendapatkan bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Kecamatan Banyubiru perlu dilakukannya pemberdayaan

masyarakat mengingat masyarakat di Kecamatan Banyubiru memiliki karakteristik masyarakat yang hampir perkotaan, sehingga partisipasi masyarakat dapat dibangun untuk meningkatkan pola kegotong-royongan yang semakin baik lagi.

Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berawal pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yaitu berupa pembangunan sarana prasarana dasar di wilayah perdesaan. Adapun sarana prasarana yang telah dibangun diantaranya adalah pembangunan prasarana jalan seperti pengerasan jalan, pengaspalan jalan dan pembetonan jalan yang berguna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan saluran air untuk mencegah banjir dan demi kenyamanan lingkungan perdesaan. Penyediaan sarana prasarana dasar melalui PPIP dibutuhkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat perdesaan dalam proses pelaksanaan sampai pengevaluasian. Tingkat keterlibatan masyarakat Kecamatan Banyubiru dan output manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dinilai cukup baik. Namun, tingkat partisipasi dalam keberlanjutan program ini belum terwujud dengan baik.

Sehubungan dengan hal ini untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru salah satu penerima bantuan PPIP dan manfaat yang diperoleh perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah perdesaan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam kegiatan PPIP, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur perdesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah desa yang berada di Kecamatan Banyubiru, hal ini akan membuat kecemburuan terhadap wilayah perdesaan yang lain. Selain itu, PPIP di Kecamatan Banyubiru belum dapat menjangkau seluruh permasalahan infrastruktur yang ada di desa, karena hanya beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dijangkau meliputi pembangunan jalan dan talud. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPIP dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan dinilai belum cukup baik, hal ini sesuai dengan survey yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Oktober 2015 yakni melakukan wawancara dengan kepala desa dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang terlibat dalam kegiatan PPP di Kecamatan Banyubiru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PPIP maka perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan iuran atau retribusi untuk pemeliharaan infrastruktur perdesaan yang telah dibangun melalui kegiatan PPIP, agar infrastruktur perdesaan tetap terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi desa-desa di Kecamatan Banyubiru yang telah menerima bantuan

tersebut. Selain itu, retribusi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan lainnya jika desa-desa di Kecamatan Banyubiru sudah tidak mendapatkan bantuan PPIP.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi :

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai PPIP di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPIP secara berkelanjutan di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang?
3. Berapa besarnya nilai *Willingnes To Pay* (WTP) yang bersedia dibayar oleh masyarakat dalam upaya mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai PPIP di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPIP secara berkelanjutan di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis besarnya nilai *willingnes to pay* (WTP) yang bersedia dibayar oleh masyarakat dalam mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang terkait dengan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), khususnya kepada:

1. Peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, termasuk bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dan pengembangan dengan penelitian terkait yang sudah ada sebelumnya.
2. Bagi akademisi, dapat menambah literatur dalam melakukan kajian mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) .
3. Bagi pemerintah dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam penerapan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan keberlanjutan dari program tersebut khususnya di daerah perdesaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang kemudian ditetapkan perumusan masalahnya. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan penjelasan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi keterbatasan penelitian.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Barang Publik

Menurut Fauzi (2006) menyatakan bahwa dalam pandangan ekonomi, barang (*goods*) dapat diklasifikasikan menurut kriteria-kriteria penggunaan atau konsumsinya dan hak pemilikannya. Dari sisi konsumsinya, barang publik bersifat (*rivalry*) artinya apakah barang tersebut menimbulkan ketersaingan untuk mengkonsumsinya atau tidak. Dari sisi hak pemilikan, barang publik bersifat (*excludable*) artinya suatu barang dapat dilihat dari kemampuan pemilik (produsen) untuk mencegah pihak lain untuk memilikinya.

Menurut Wirasata (2010) barang publik dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Barang Publik murni (*pure public goods*), contohnya: pertahanan nasional (*defence*) dan layanan pemadam kebakaran (*fire service*), dimana pengadaan barang publik murni ini dibiayai dari pajak. Dengan begitu terdapat empat karakteristik barang publik murni, sebagai berikut:
  - a. *Nonrivalry in consumption*, barang publik merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam mengkonsumsinya.
  - b. *Nonexclusive*, penyediaan barang publik tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang eksklusif antar individu dalam masyarakat, semua orang memiliki hak yang sama untuk mengkonsumsinya.

- c. *Low excludability*, penyedia atau konsumen suatu barang tidak bisa menghalangi atau mengecualikan orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut.
  - d. *Low competitive*, antar penyedia barang publik tidak saling bersaing secara ketat, hal ini karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama.
2. Barang semi publik (*quasi public goods*) atau biasa juga disebut *common pool goods*, yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini sebetulnya mempunyai daya saing yang tinggi tetapi *non excludable*, maksudnya penyedia atau konsumen barang atau pelayanan publik ini tidak bisa menghalangi/mengecualikan orang lain untuk menggunakan serta memperoleh manfaat dari barang tersebut, meskipun konsumsi seseorang akan mengurangi keberadaan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan barang atau jasa semi publik ini sebagian dapat dibiayai oleh sektor publik dan sebagian lainnya dibiayai oleh sektor privat. Menurut Fauzi (2006), karakteristik barang publik, yaitu :
- a. *Non-Rivalry* (tidak ada ketersaingan) atau *non-divisible* (tidak habis). Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama.

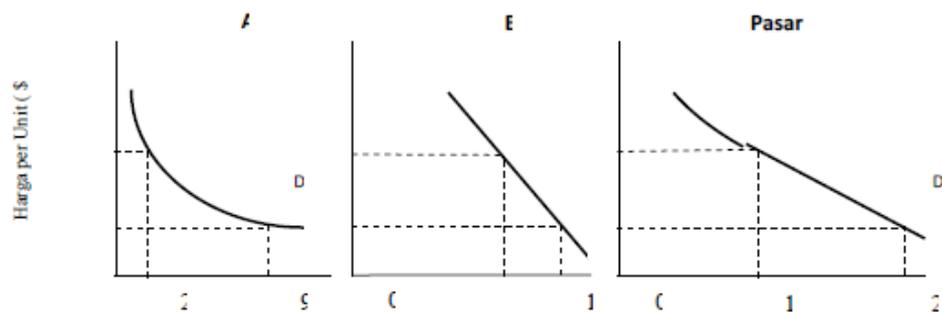
Contohnya udara yang kita hirup, dalam derajat tertentu tidak berkurang bagi orang lain untuk menghirupnya.

- b. *Non-Excludable* (tidak ada larangan). Artinya sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Pada saat menikmati pemandangan laut yang indah di pantai, maka tidak bisa atau sulit melarang orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama karena pemandangan adalah *public goods*.

### 2.1.2. Permintaan Barang Publik

Ekonom Paul Samuelson menunjukkan bahwa ada tingkat output yang optimal untuk tiap barang publik dan memberikan solusi untuk masalah tentang individu dalam menentukan pilihan (Case Fair, 2006)

**Gambar 2.1**  
**Konsumen Menentukan Pilihan Kuantitas dalam Barang Pribadi**

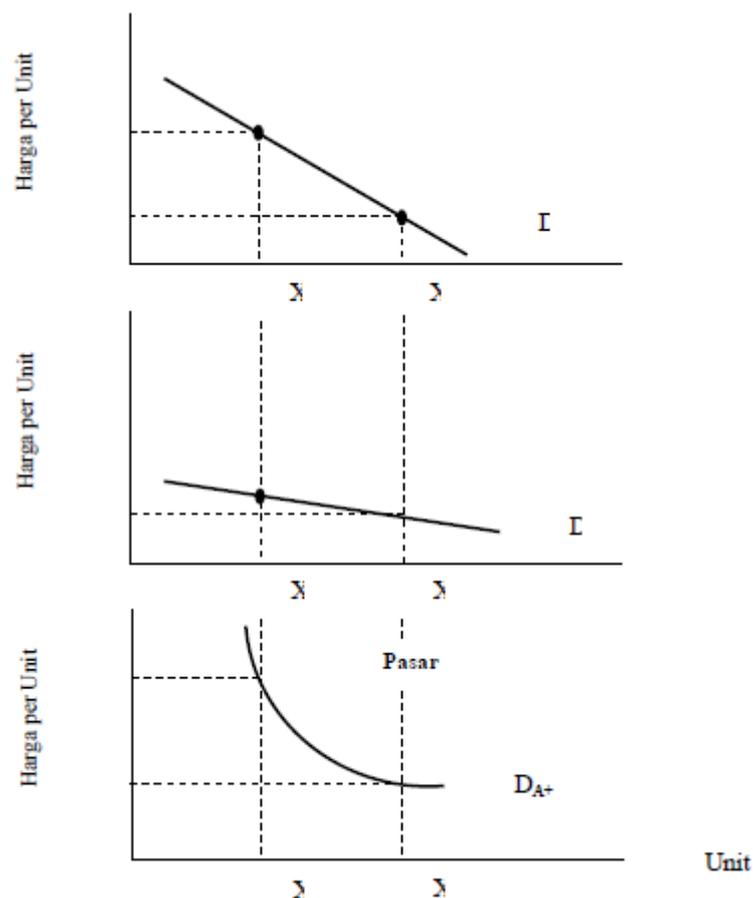


Sumber : Case and fair, 2006

Pada Gambar 2.1. menjelaskan tentang kurva penurunan permintaan pasar. Diasumsikan masyarakat terdiri dari dua orang, A dan B. Pada harga \$1, A meminta 9 unit barang pribadi dan B meminta 13. Permintaan pasar pada harga \$1 adalah 22 unit. Jika harga meningkat ke \$3, kuantitas yang diminta A akan turun ke 2 unit dan B akan turun ke 9 unit. Jadi permintaan pasar pada harga \$3 adalah 2

+ 9 = 11. Sehingga, mekanisme harga memaksa orang untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, dan memaksa perusahaan untuk hanya memproduksi apa yang bersedia dibayar oleh orang, tapi hanya berhasil dengan cara ini saja karena kemungkinan adanya pemisahan.

**Gambar 2.2.**  
**Kesediaan Membayar Konsumen yang Berbeda dalam Satu Tingkat Output**



Sumber: Case and Fair, 2006

Pada Gambar 2.2. menjelaskan kurva permintaan untuk pembeli A dan B. Jika barang publik tersedia dipasar swasta pada harga \$6, A akan membeli  $X_1$  unit. Dengan kata lain, A bersedia membayar \$6 untuk mendapatkan  $X_1$  untuk barang publik dan B bersedia membayar hanya \$3 per unit untuk mendapatkan  $X_1$

barang publik. Sehingga A dan B bersedia membayar \$9 untuk X1 unit. Sifat barang publik *nonrivalry* memberikan manfaat langsung yang didapatkan oleh setiap orang. Jika X1 diproduksi, A mendapatkan X1, B mendapatkan X1. Jika X2 diproduksi, A mendapatkan X2 dan B mendapatkan X2. Semua konsumen akan mengonsumsi barang publik dengan kuantitas yang sama. Faktanya, barang publik yang baik tidak bisa memberi harga dikarenakan bukan termasuk barang pengeluaran.

Dalam permintaan pasar untuk barang publik kuantitas permintaan tidak dijumlahkan, namun menambahkan jumlah yang bersedia dibayar oleh rumah tangga individu untuk tiap tingkat output potensial. Case Fair (2006) mendefinisikan permintaan pasar untuk barang publik adalah jumlah vertikal kurva permintaan individu dari menambahkan jumlah berbeda yang bersedia dibayar oleh rumah tangga untuk mendapatkan masing-masing tingkat output.

Permintaan untuk barang publik ditemukan dengan menambahkan kurva permintaan secara vertikal. Kurva permintaan menggambarkan kesediaan konsumen untuk membayar harga pajak tertentu untuk suatu kepentingan publik. Kurva tersebut dijelaskan sebagai "*pseudo-demand curve*" atau "kurva substitusi tingkat marjinal" karena setiap orang menyatakan kesediaannya untuk membayar output dari barang publik. Keseimbangan ditemukan saat total kesediaan membayar pajak sama dengan harga dari barang publik. Keseimbangan ini mencerminkan penjumlahan dari substitusi tingkat marjinal yang sama dengan tingkat transformasi marjinal. Masalah *free rider* yang muncul ketika individu tidak mengungkapkan preferensi mereka, tetapi masih mengonsumsi barang

publik. Kendala anggaran adalah representasi dari kombinasi barang individu yang dapat dibeli, dilihat dari tingkat pendapatan dan harga pajak. Diasumsikan  $t$  = pajak individu,  $C$  = konsumsi individu atas barang privat,  $G$  = jumlah total barang publik yang disediakan,  $Y$  = pendapatan individu. Kendala anggaran individu dinyatakan dalam cara berikut:

$$C + tG = Y$$

### 2.1.3. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen (*customer behavior*) merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan pengertian kepuasan konsumen menurut adalah sebagai keseluruhan sikap yang ditujukan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh atau menggunakannya.

#### 2.1.3.1. Nilai Utilitas

Menurut Sukirno (2011), Teori nilai guna (*utilitas*) yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi nilai guna atau *utility*. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang maka nilai guna atau *utility* semakin rendah pula. Nilai guna dibedakan diantara dua pengertian :

- a. Nilai guna marginal yaitu penambahan/ pengurangan kepuasan akibat adanya penambahan/pengurangan suatu unit barang tertentu.

- b. Total nilai guna yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu.

Jika konsumen membeli barang karena mengharap memperoleh nilai gunanya, tentu saja secara rasional konsumen berharap memperoleh nilai guna optimal. Secara rasional nilai guna akan meningkat jika jumlah komoditi yang dikonsumsi meningkat.

Ada dua cara mengukur nilai guna dari suatu komoditas yaitu secara *cardinal* (dengan menggunakan pendekatan nilai *absolute*) dan secara *ordinal* (dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau ranking). Dalam pendekatan *cardinal* bahwa nilai guna yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur secara pasti.

Teori kurva indifferen/ordinal adalah garis utilitas yang sama besar (*constant utility countour*) dari kombinasi barang. Ciri-ciri kurva indifferen yang pertama adalah mempunyai kemiringan negatif dari kiri ke atas ke kanan bawah. Pada kasus tertentu, tegak/datar terdiri dari titik-titik konsumsi barang X dan Y. Ciri kedua, tidak mungkin berpotongan satu dengan lain sesuai preferensi konsumen, dan ciri yang ketiga dari kurva indifferen adalah berbentuk cembung.

#### **2.1.3.2. Utilitas Marjinal**

Utilitas marjinal berhubungan dengan kebutuhan manusia, namun kebutuhan manusia tidak memiliki batas. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya manusia perlu membuat keputusan dalam menentukan pilihan mana yang akan diambil agar tercapai kepuasan yang maksimal. Utilitas marginal (MU) adalah kepuasan tambahan yang diperoleh dengan mengkonsumsi atau

menggunakan tambahan satu unit barang. Sedangkan utilitas total adalah jumlah kepuasan total yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Berdasarkan hukum Gossen atau yang biasa dikenal dengan *law of diminishing marginal utility* berlaku bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan nilai kepuasannya yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun dan konsumen akan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan total maksimum.

#### **2.1.4. Eksternalitas**

Menurut Fauzi (2006) menyatakan bahwa secara umum eksternalitas didefinisikan sebagai dampak (positif atau negatif), atau dalam bahasa formal ekonomi sebagai *net cost* atau *benefit*, dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Lebih spesifik lagi eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Eksternalitas merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak terbatas pada pengelolaan sumber daya alam seperti jalan yang macet, asap rokok dari orang lain yang merokok dan asap pembakaran sampah.

Menurut Friedman (dalam Fauzi, 2006), menyatakan bahwa eksternalitas dan barang publik adalah dua cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah yang sama. Eksternalitas yang positif melahirkan barang publik, sementara eksternalitas negatif menghasilkan barang publik “negatif”. Artinya, jika eksternalitas negatif tidak diproduksi, maka akan menghasilkan barang publik.

Menurut Kula (dalam Fauzi, 2006) menyebut tipe eksternalitas ini sebagai eksternalitas teknologi (*technological externalities*) karena adanya perubahan konsumsi atau produksi oleh satu pihak terhadap pihak lain yang lebih bersifat teknis. Menurut Hartwick dan Olewiler (dalam Fauzi, 2006), menyatakan bahwa menggunakan terminologi lain untuk menggambarkan eksternalitas. Eksternalitas privat melibatkan hanya beberapa individu, bahkan bisa bersifat bilateral dan tidak menimbulkan *spill over* (limpahan) kepada pihak lain. Sementara itu, eksternalitas publik terjadi pada saat barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat.

Eksternalitas dapat dibagi berdasarkan interaksi agen ekonomi yaitu:

1. *Producer to producer externality*, terjadi jika aktivitas suatu produsen mengakibatkan perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contoh: limbah produsen pulp di hulu sungai dapat merugikan nelayan (produsen hilir).
2. *Producer to consumer externality*, terjadi jika aktivitas suatu produsen mengakibatkan perubahan/pergeseran fungsi utilitas rumah tangga (konsumen). Contoh: polusi suara, udara, air.
3. *Consumer to consumer externality*, terjadi jika aktivitas seseorang atau sekelompok konsumen mempengaruhi fungsi utilitas konsumen lain. Contoh: polusi suara, asap rokok.
4. *Consumer to producer externality*, terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi suatu atau sekelompok produsen. Contoh:

pembuangan limbah rumah tangga ke aliran sungai dapat mengganggu nelayan.

Masalah eksternalitas pada umumnya disebabkan oleh:

1. Keberadaan Barang Publik

Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (*pure public goods*) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.

Kajian ekonomi sumber daya dan lingkungan salah satunya menitikberatkan pada persoalan barang publik atau barang umum ini (*common consumption, public goods, common property resources*). Ada dua ciri utama dari barang publik ini. Pertama, barang ini merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan (*joint supply*) dan tidak bersaing dalam mengkonsumsinya (*non rivalry in consumption*). Ciri kedua adalah tidak eksklusif (*non-exclusion*) dalam pengertian bahwa penawaran tidak hanya diperuntukkan untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya.

Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi bidang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga ini bisa dipakai untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu

sendiri. Tapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan. Karena ciri-cirinya diatas, barang publik tidak diperjualbelikan sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai insentif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung tidak peduli dalam menentukan harga sesungguhnya dari barang publik ini. Dalam hal ini, mendorong sebagian masyarakat sebagai "*free rider*". Keadaan seperti ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien. Karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (*undervalued*).

## 2. Sumber Daya Bersama

Keberadaan sumber daya bersama (*common resources*) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik diatas. Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memnfaatkannya, dan tanpa biaya. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaing. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu memperjuangkan sebarapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik rentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus sumber daya bersama ini

adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang dikenal dengan istilah Tragedi Barang Umum (*The Tragedy of the Commons*).

### 3. Ketidaksempurnaan Pasar

Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar menukar hak-hak kepemilikan (*property right*) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (*outcome*). Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna (*Imperfect Market*) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal).

Ketidaksempurnaan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Contoh konkrit dari praktek ini adalah Organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC) dengan memproduksi dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari normal. Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadinya peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan, praktek monopoli ini merugikan masyarakat (*worse-off*).

### 4. Kegagalan Pemerintah

Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak sah diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (*government failure*). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (*interest groups*) yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (*rent seeking*) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Pencarian keuntungan (*rent seeking*) bisa dalam berbagai bentuk:

1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu (*interest groups*) melakukan loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan.
2. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.
3. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan aturan-aturan yang mendorong efisien tidak berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Sebagai contoh, Perusahaan A yang mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan. Berdasarkan perhitungan atau estimasi perusahaan A harus mengeluarkan biaya (denda) yang besar (misalnya Rp 1 milyar) untuk menggurangi efek dari limbah yang dihasilkan itu. Pencari keuntungan (*rent seeker*) bisa dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintah atau oknum memungkinkan membayar kurang dari 1 milyar agar peraturan sesungguhnya tidak diberlakukan, dan denda informal ini belum tentu menjadi *revenue* pemerintah. Sehingga akhirnya dampak lingkungan yang

seharusnya diselidiki dan ditangani tidak dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalahnya menjadi serius dari waktu ke waktu.

#### **2.1.5. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan (Implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam implementasi program/ proyek yang dilaksanakan. Dana anggaran yang tersedia relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program / proyek dalam masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencarian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input data (sumber daya manusia, dana, peralatan / sarana, data, rencana, dan teknologi, (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan, (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi). Efektivitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target

yang direncanakan. Sedangkan efisien dimaksudkan yaitu dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif menurut Samsura (2003) dianggap sebagai strategi pembangunan dan penentuan keputusan publik, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk bersedia melibatkan diri dalam pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan masyarakat yang terwujud dalam perencanaan partisipatif, dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik, memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai *participatory planning*, jika dikaitkan dengan pendapat Friedman (1987) sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau curah pikir pada pelaku pembangunan (*stakeholders*). Proses politik ini dilakukan secara

transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya.

Selanjutnya Oetomo (1997) peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah:

- a) Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan;
- b) Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan;
- c) Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang;
- d) Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan;
- e) Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan;
- f) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- g) Bantuan tenaga ahli.

Keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan sangat menentukan dalam merumuskan, melakukan pemilihan dan penilaian terhadap berbagai alternatif kegiatan yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa adanya kerjasama yang baik memberikan makna dalam perencanaan suatu pembangunan tidak dilakukan oleh sepihak, dan atas dasar tersebut masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan pembangunan.

Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu konsep fundamental yang berlaku dan diterapkan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat itu mengikuti perkembangan zaman dari sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaan

pembangunannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik (otonomi daerah), mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *bottom-up* dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi dan menekankan keputusan di tangan masyarakat.

#### **2.1.6. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) bahwa partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, H.A.R. 2009)

Menurut Soetrisno (1995) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat, yaitu : definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencanaan pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencanaan. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintahan dan definisi kedua yang ada dana berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan. Melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga dan tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek ini.

Menurut Nasdian (2006) bahwasanya partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Keseluruhan tingkatan partisipasi di atas merupakan kesatuan integratif dari kegiatan pengembangan pedesaan, meskipun sebuah siklus konsisten dari kegiatan partisipasi mungkin dinilai belum biasa. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan

keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi tersebut (Arnstein 1986 dalam Wicaksono 2010).

**Tabel 2.1**  
**Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein**

No	Tangga / Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesetaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
2.	Terapi ( <i>Therapy</i> )	Sekedar agar masyarakat tidak marah/ sosialisasi	
3.	Pemberitahuan ( <i>Informing</i> )	Sekedar pemberitahuan searah/ sosialisasi	Tokenism/ sekedar
4.	Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu dipakai sarannya	justifikasi agar mengiyakan
5.	Penentraman ( <i>Placation</i> )	Saran msayarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	Kemitraan ( <i>Patnership</i> )	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7.	Pendelegasian Kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> )	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8.	Kontrol Masyarakat ( <i>Citizen Control</i> )	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber : Arnstein (1969 : 217) dalam Wicaksono (2010)

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

### 2.1.7. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk

partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Menurut Holil dalam (Adi, Isbandi, 2007) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

- a) Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program;
- b) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan;
- c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta, benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Sedangkan menurut Chapin (dalam Abe, 2002) mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan;
- b) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk

mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya;

- c) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama;
- d) Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

## **2.1.8. Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.1.8.1. Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranaka (1996) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Dahl, Robert (1983), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi

atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Menurut Talcot Parsons (dalam Priyono, 1996:64-65) *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam,

berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Basleman et al, 1994 :106). Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu: (1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan (3) Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand Theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 1996:54-55).

#### **2.1.8.2. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip dan dasar dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) terdiri dari lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai

untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

### **2.1.8.3. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan (Suharto, 2006:59).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang

lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

- b. *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- c. *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

- f. *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- g. *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j. *Helping people to continue to work on solving their problems*; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- k. *Increasing people's ability for self-help*; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.

Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Oakley dan Marsden (1984), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (*daya*) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan

sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

#### **2.1.8.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melalui pemberdayaan tersebut, dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat**

<b>Tahapan Afektif</b>	<b>Tahapan Kognitif</b>	<b>Tahapan Psikomotorik</b>	<b>Tahapan Konatif</b>
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber : Sulistyani, 2004

### **2.1.9. Paradoks Abilene : *Management of Agreement***

Menurut Fauzi (2014) istilah paradoks Abilene pertama kali dikenalkan oleh guru besar Manajemen George Washington University, Profesor Jerry Harvey yang pada tahun 1988 mempublikasi papernya berjudul "*The Abilene Paradox: The Management of Agreement*". Diberi nama Abilene karena diambil dari kota Abilene di wilayah Texas. Paradoks Abilene kemudian digunakan sebagai istilah ketika dalam suatu organisasi, kelembagaan maupun komunitas terjadinya konflik atau kontradiksi preferensi maupun kesepakatan terhadap suatu

tujuan. Dengan kata lain Paradoks Abilene menggambarkan situasi dimana suatu organisasi mengambil tindakan yang kontradiksi dengan data dan preferensi masyarakat sehingga bukannya memecahkan masalah namun menambah masalah. Paradoks Abilene secara fundamental muncul karena adanya kegagalan dalam mengelola kesepakatan. Masing-masing anggota dalam organisasi atau lembaga gagal mengkomunikasikan secara tepat tentang keinginan atau keyakinan yang mereka miliki, bahkan terjadi sebaliknya sehingga terjadi kesalahan persepsi “realitas kolektif”. Konsensus kelompok dicapai berdasarkan asumsi yang keliru dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukan akibat terjadi informasi yang asimetrik.

#### **2.1.9.1. Gejala Paradoks Abilene**

Ketidakmampuan untuk mengelola kesepakatan, bukan ketidakmampuan mengelola konflik, adalah gejala penting mendefinisikan organisasi terjebak dalam jaring Abilene Paradoks. Ketidakmampuan itu untuk mengelola kesepakatan efektif terdiri dari:

1. Anggota Organisasi setuju pribadi, sebagai individu, seperti sifat situasi atau masalah yang dihadapi organisasi. Sebagai contoh, anggota kelompok Abilene setuju bahwa mereka sedang menikmati diri mereka sendiri duduk didepan kipas angin, menghirup limun, dan bermain domino.
2. Anggota Organisasi setuju pribadi, sebagai individu, untuk langkah-langkah yang akan diperlukan untuk mengatasi situasi atau masalah mereka hadapi. Untuk anggota kelompok Abilene "Lebih sama" adalah solusi yang akan telah cukup puas masing-masing dan keinginan kolektif.

3. Anggota Organisasi gagal untuk secara akurat mengkomunikasikan keinginan dan/atau keyakinan mereka kesalah satu yang lain. Bahkan, mereka melakukan hal yang berlawanan dan sehingga menyebabkan satu sama lain dalam kekeliruan persepsi dari realitas kolektif. Setiap anggota Abilene kelompok, misalnya, dikomunikasikan akurat data ke anggota lain dari organisasi. Itu data, pada dasarnya, kata, "Ya, itu ide yang bagus. Mari pergi ke Abilene, "ketika pada anggota realitas organisasi secara individual dan kolektif disukai untuk tinggal di Coleman.
4. Dengan informasi yang tidak valid dan tidak akurat tersebut, anggota organisasi membuat kolektif keputusan yang membuat mereka mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang ingin mereka lakukan, dan dengan demikian tiba di hasil yang kontraproduktif untuk maksud dan tujuan organisasi. Dengan demikian, kelompok Abilene pergi ke Abilene ketika lebih suka melakukan sesuatu yang lain.
5. Sebagai akibat dari mengambil tindakan yang kontraproduktif, anggota organisasi pengalaman frustrasi, kemarahan, iritasi, dan ketidakpuasan dengan organisasi mereka. Akibatnya, mereka membentuk subkelompok dengan jumlah yang banyak dan menyalahkan subkelompok lainnya untuk dilema organisasi.
6. Akhirnya, jika anggota organisasi tidak berurusan dengan masalah generik ketidakmampuan untuk mengelola kesepakatan siklus berulang dengan intensitas yang lebih besar. Abilene kelompok, untuk berbagai alasan, yang paling penting adalah bahwa hal itu menjadi sadar akan proses, tidak

mencapai titik itu. Untuk mengulang, Abilene Paradox mencerminkan kegagalan untuk mengelola kesepakatan. Bahkan, itu adalah anggapan bahwa ketidakmampuan untuk mengatasi (mengelola) kesepakatan, bukan ketidakmampuan untuk mengatasi (mengelola) konflik, adalah tunggal kebanyakan masalah yang mendesak dari organisasi modern.

#### **2.1.9.2. Mengatasi Paradoks Abilene**

Dengan asumsi awal penyebab seseorang untuk percaya sebuah organisasi adalah cara untuk mengetahui Abilene, individu mungkin memilih aktif menghadapi situasi untuk menentukan langsung apakah realitas yang mendasari merupakan salah satu kesepakatan atau konflik, meskipun ada cara untuk melakukannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pendekatan dasar melibatkan pengumpulan anggota yang tokoh utama dalam masalah dan solusinya menjadi ketua kelompok. Dalam konteks kelompok penting karena dinamika Paradoks Abilene melibatkan kolusi antara kelompok anggota. Oleh karena itu, untuk mencoba memecahkan dilema bekerja dengan individu dan subkelompok kecil akan melibatkan kolusi lanjut dengan dinamika yang mengarah ke paradoks. Adapun tindakan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat teknis adalah jika terjadi adanya paradoks, solusi yang dapat dilakukan untuk masalah teknis paradoks yaitu melatih untuk percaya bahwa solusi untuk konflik membutuhkan proses yang panjang dan melelahkan. Dalam pemecahan masalah, resiko eksistensial juga selalu hadir, yang akan mengakibatkan perdebatan sengit tentang teknologi, kepribadian, dan/atau administratif pendekatan. Bukti perdebatan tersebut,

dikelola dengan baik, sehingga dapat menjadi dasar untuk kreativitas pemecahan masalah dalam organisasi. Ada kemungkinan bahwa perdebatan tersebut tidak dapat dikelola dan substantiating konsep risiko eksistensial, orang yang memulai risiko dapat dipecat atau dikucilkan. Tapi itu lagi mengarah ke perlunya mengevaluasi hasil konfrontasi tersebut di tingkat eksistensial.

- b. Hasil Eksistensial adalah mengevaluasi hasil konfrontasi dari eksistensial kerangka yang sangat berbeda dari evaluasi dari seperangkat kriteria teknis. Solusinya adalah menghadapi paradoks dengan menjelaskan kegagalan dari hasil teknis, dan yang paling penting, tindakan konfrontasi rupanya memberikan intrinsik psikologis kepuasan, terlepas dari teknologi hasil bagi mereka yang mencobanya.

#### **2.1.10. Konsep *Contingent Valuation Method* (CVM)**

*Contingent Valuation Method* (CVM) diperkenalkan oleh Davis (dalam Fauzi, 2006). CVM merupakan suatu metode yang memungkinkan untuk memperkirakan nilai ekonomi dari suatu komoditi yang tidak diperdagangkan dalam pasar. *Contingent Valuation Method* (CVM) menggunakan pendekatan secara langsung yang pada dasarnya menanyakan kepada masyarakat mengenai berapa besar nilai maksimum dari WTP untuk manfaat tambahan atau berapa besar nilai maksimum dari WTA sebagai kompensasi dari kerusakan barang lingkungan.

Tujuan dari CVM adalah untuk mengetahui keinginan membayar (*willingness to pay* atau WTP) dari masyarakat, serta mengetahui keinginan

menerima (*willingness to accept* atau WTA) kerusakan suatu lingkungan (Fauzi, 2006). Selain itu, kelebihan dan kelemahan pendekatan CVM dalam memperkirakan nilai ekonomi suatu lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipalिकासikan pada semua kondisi dan memiliki dua hal yang penting yaitu: seringkali menjadi hanya satu-satunya teknik untuk mengestimasi manfaat, dapat diaplikasikan pada berbagai konteks kebijakan lingkungan.
2. Dapat digunakan dalam berbagai macam penilaian barang-barang lingkungan di sekitar masyarakat.
3. Dibandingkan dengan teknik penilaian yang lain. CVM memiliki kemampuan untuk mengestimasi nilai non pengguna. Dengan CVM, seseorang mungkin dapat mengukur utilitas dari penggunaan barang lingkungan bahkan jika digunakan secara langsung.
4. Kapasitas CVM dapat menduga "nilai non pengguna" (*non-use value*).
5. Responden dapat dipisahkan ke dalam kelompok pengguna dan non pengguna sesuai dengan informasi yang dapat didapatkan dari kegiatan wawancara. Sehingga memungkinkan perhitungan nilai tawaran pengguna dan non pengguna secara terpisah.

Adapun kelemahan pendekatan CVM dalam memperkirakan nilai ekonomi suatu lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. *Strategi bias* muncul dari ketidakjujuran responden yang mencoba memanipulasi hasil analisis dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dimasa datang.

2. *Information bias* muncul karena kurang lengkapnya informasi yang ditawarkan oleh pewawancara kepada responden.
3. *Instrument bias* muncul dari reaksi subjek survey pada alat pembayaran yang dipilih atau pilihan yang ditawarkan.
4. *Hypotetical bias* muncul karena masalah potensial pada kondisi pasar atau kenyataan yang tidak riil dimana subjek tidak menanggapi proses survey dengan sering dan jawaban cenderung tidak memenuhi pertanyaan yang diajukan .
5. *Starting point bias* muncul pada kasus permintaan penawaran salah satunya sebagai akibat terlalu lama dan panjang dalam proses wawancara.

#### **2.1.11. Kesiediaan Untuk Membayar atau *Willingnes to Pay* (WTP)**

Fauzi (2006) menyatakan bahwa secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar (*willingnes to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa “menterjemahkan” ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa.

Menurut Hanley dan Spash (dalam Fauzi, 2006) Kesiediaan untuk membayar atau *willingness to pay* (WTP) adalah kesiediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya

alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. WTP menghitung seberapa jauh kemampuan setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai dengan standar yang diinginkan. WTP merupakan nilai kegunaan potensial dari sumberdaya alam dan jasa lingkungan.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam WTP untuk menghitung peningkatan atau kemunduran kondisi lingkungan adalah:

1. Menghitung biaya yang bersedia dikeluarkan oleh individu untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan karena adanya suatu kegiatan pembangunan.
2. Menghitung pengurangan nilai atau harga dari satu barang akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan.
3. Melalui suatu survey untuk menentukan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar dalam rangka mengurangi dampak negatif pada lingkungan atau untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

#### **2.1.12. Menentukan Nilai Willingness To Pay**

Nilai *willingness to pay* dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan CVM. Beberapa tahap dalam penerapan analisis CVM menurut Fauzi (2006), yaitu :

1. Membuat Pasar Hipotetik (*Setting the hypothetical market*)

Pasar hipotetik dibangun untuk memberikan suatu alasan mengapa masyarakat seharusnya membayar terhadap suatu barang atau jasa lingkungan dimana tidak terdapat nilai dalam mata uang berapa harga barang atau jasa

lingkungan tersebut. Pasar hipotetik harus menggambarkan bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan. Skenario kegiatan harus diuraikan secara jelas dalam kuesioner sehingga responden dapat memahami barang lingkungan yang dipertanyakan serta keterlibatan masyarakat dalam rencana kegiatan. Selain itu, dalam kuesioner perlu pula dijelaskan perubahan yang akan terjadi jika terdapat keinginan masyarakat untuk membayar.

## 2. Mendapatkan Penawaran Besarnya nilai WTP (*Obtaining bids*)

Penawaran besarnya nilai WTP dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan tatap muka, perantara telepon, atau dengan menggunakan surat. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai WTP, yaitu :

- a. *Bidding Game*, yaitu metode tawar-menawar dimana responden ditawarkan sebuah nilai tawaran yang dimulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar hingga mencapai nilai WTP maksimum yang sanggup dibayarkan oleh responden.
- b. *Closed-ended Referendum*, yaitu metode dengan memberikan sebuah nilai tawaran tunggal kepada responden, baik responden setuju ataupun responden tidak setuju dengan nilai tersebut.
- c. *Payment Card*, yaitu suatu nilai tawaran disajikan dalam bentuk kisaran nilai yang dituangkan dalam sebuah kartu yang mungkin mengindikasikan tipe pengeluaran responden terhadap barang/ jasa publik yang diberikan.
- d. *Open-ended Question*, yaitu suatu metode pertanyaan terbuka tentang WTP maksimum yang sanggup mereka berikan dengan tidak adanya nilai

tawaran sebelumnya. Namun, metode ini biasanya responden mengalami kesulitan untuk menjawab, khususnya bagi yang belum memiliki pengalaman sebelumnya mengenai nilai perdagangan komoditas yang dipertanyakan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan nilai penawaran menggunakan pendekatan metode permainan lelang (*Bidding game*) karena penelitian ini ingin mengetahui besarnya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi dalam upaya mensukseskan PPIP dilihat dari besarnya nilai WTP terendah hingga nilai tertinggi yang diberikan oleh masyarakat.

### 3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP (*Estimating mean willingness to pay*)

Perhitungan nilai penawaran menggunakan nilai rata-rata, maka akan diperoleh nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, oleh karena itu lebih baik menggunakan nilai tengah agar tidak dipengaruhi oleh rentang penawaran yang cukup besar. Nilai tengah penawaran selalu lebih kecil daripada nilai rata-rata penawaran. Dalam penelitian ini, WTP<sub>i</sub> dapat diduga dengan menggunakan nilai rata-rata dari penjumlahan keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden. Dugaan Rataan WTP dihitung dengan rumus :

$$\text{Dimana : } EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n}$$

EWTP : Dugaan rata-rata WTP

W<sub>i</sub> : Nilai WTP ke-*i*

n : Jumlah responden

*i* : Responden ke-*i* yang bersedia membayar (*i*= 1,2,3,...,n)

#### 4. Menjumlahkan Data (*Aggregating the data*)

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai tengah WTP maka dapat diduga nilai total WTP dari masyarakat. Rumus Total WTP:

$$TWTP = \sum_{i=0}^n WTP_i n_i$$

Dimana :

TWTP : Total WTP

WTP<sub>i</sub> : WTP individu sampel ke-*i*

*n<sub>i</sub>* : Jumlah sampel ke-*i* yang bersedia membayar sebesar WTP

*i* : Responden ke-*i* yang bersedia membayar (*i*= 1,2,3,...,n)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

### 1. Zaiton Samdin (2008)

Zaiton Samdin, melakukan penelitian mengenai kesediaan pengunjung untuk membayar konservasi satwa langka di Taman Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membangun kebijakan penetapan harga yang tepat untuk taman nasional dan konservasi satwa langka agar tidak diperdagangkan di pasar seperti banyak komoditas lain sehingga mereka memerlukan penggunaan teknik penilaian non pasar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penilaian non-pasar adalah metode langsung Contingent Valuation Method (CVM), dengan willingness to pay (WTP) sebagai metode elisitasi, CVM

diguakan untuk menentukan kebijakan harga yang tepat untuk berkelanjutan pengelolaan Taman Negara National Park (TNTP).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengunjung bersedia membayar lebih dari biaya masuk dan menyajikan implikasi kebijakan untuk memandu manajemen TNTN dimasa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini memfasilitasi dalam membangun suatu kebijakan harga yang efisien dan realistis untuk TNTP dan WTP dapat digunakan untuk kebijakan harga yang di tetapkan oleh daerah.

## 2. Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdian (2011)

Isma Rosyida, dkk meneliti mengenai partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis tingkat partisipasi *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam penyelenggaraan program CSR, selain itu menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kartini dalam penyelenggaraan program CSR dengan dampak sosial komunitas perdesaan, dan menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam LKMS Kartini dalam penyelenggaraan program CSR dengan dampak ekonomi komunitas perdesaan.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Isma Rosyida, dkk menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode triangulasi merupakan metode yang dipilih untuk pengumpulan data kualitatif

agar memperoleh kombinasi yang akurat berupa wawancara mendalam, pengamatan berpartisipatif dan penelusuran dokumen. Analisis kuantitatif yaitu mengukur dampak implementasi program terhadap masyarakat akibat adanya program CSR, dilakukan melalui hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing, coding, scoring, entry, cleaning* dan analisis data menggunakan *microsoft excel SPSS 15.0 for Windows*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam di Desa Cihamerang dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga jika partisipasi anggota kelompok simpan pinjam dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi. Sejauhmana dampak sosial ekonomi diperoleh anggota kelompok simpan pinjam juga ditentukan oleh partisipasi dari stakeholder lain yang terkait.

3. Ismu Rini Dwi Ari, Kenshiro Ogi, Kakuya Matsushima, dan Kiyoshi Kobayashi (2013)

Ismu Rini Dwi Ari, dkk. melakukan penelitian mengenai berjudul *Community Participation on Water Management: Case Singosari District, Malang Regency, Indonesia*. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui partisipasi pelanggan PDAM dalam manajemen PDAM dan mengetahui kesediaan atau ketidaksiediaan pelanggan berpartisipasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis jaringan dan probit model untuk mengetahui pengaruh hubungan antar masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu dapat diketahui ada tiga karakteristik struktur sosial didalam wilayah penelitian, yaitu diantaranya adanya sumberawan, ngujung, dan RW 6. Dan variabel yang signifikan terhadap

partisipasi pelanggan adalah pilihan individu, dan variabel yang tidak berpengaruh adalah pendidikan.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

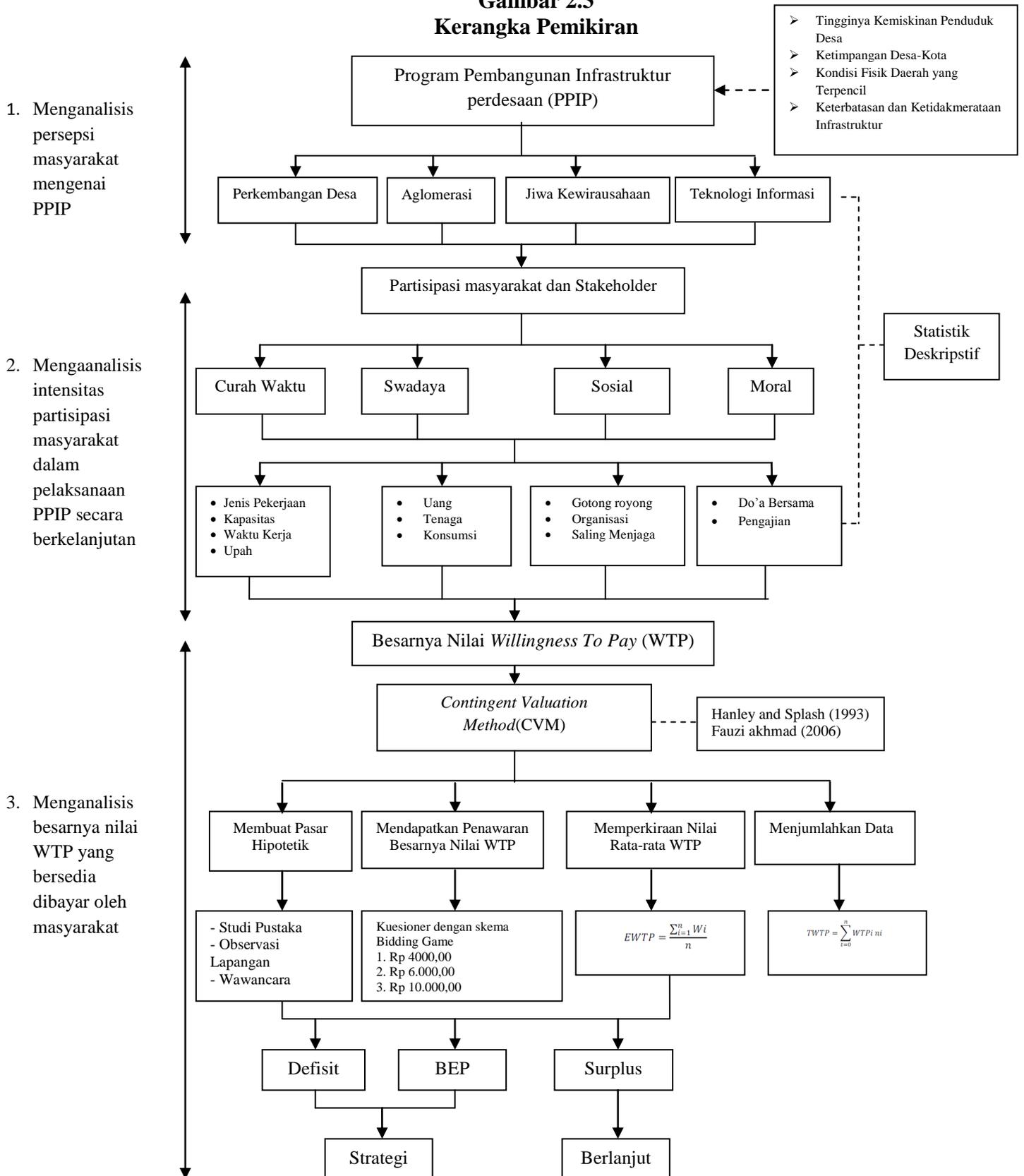
No.	Judul dan Pengarang	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Willingness to Pay in Taman Negara : A Contingent Valuation Method (Zaiton Samdin, Department of Hospitality and Recreation, Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia, 43400, Serdang, Selangor, Malaysia)	Untuk mengetahui bagaimana membangun kebijakan penetapan harga yang tepat untuk taman nasional dan konservasi satwa langka agar tidak diperdagangkan di pasar	Jenis kelamin, status perkawinan, usia Kebangsaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, riwayat pembayaran	Analisi data yang digunakan metode <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM) menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunjung bersedia membayar lebih dari biaya masuk, dan WTP dapat digunakan untuk kebijakan harga yang ditetapkan oleh daerah
2.	Partisipasi Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Dalam Penyelenggaraan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan (Isma Rosyida dan Fredian Tommy Nasdian, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB,	Untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memegang program <i>Corporate Social Responsibility</i> dari Geothermal Perusahaan melalui Badan Keuangan Mikro dan	Partisipasi, simpan pinjam, program CSR	Analisis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif dengan hasil penyebaran kuesioner kepada responden dan diolah dengan menggunakan program <i>microsoft excel</i> dan <i>SPSS 15.0</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam di Desa Cihamerang dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi lokal berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga jika partisipasi anggota kelompok simpan pinjam dalam penyelenggaraan program tinggi, maka dampak sosial dan ekonomi juga akan tinggi.

	2011)	dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.			
3.	Community Participation on Water Management: Case Singosari District, Malang Regency, Indonesia (Ismu Rini Dwi Ari, Kenshiro Ogi, Kakuya Matsushima, Kiyoshi Kobayashi, University of Brawijaya, Indonesia and Kyoto University Katsura Campus, Nishikyo-ku, Japan)	Untuk mengetahui partisipasi pelanggan PDAM dalam manajemen PDAM dan mengetahui kesediaan atau ketidaksediaan pelanggan berpartisipasi	Pendidikan, tempat bekerja, bersedia berpartisipasi atau tidak bersedia berpartisipasi	Analisis yang digunakan adalah analisis jaringan dan probit model untuk mengetahui pengaruh hubungan antar masyarakat	Hasil penelitian dapat diketahui ada tiga karakteristik struktur sosial didalam wilayah penelitian,yaitu daiantaranya adanya sumberawan, ngujung, dan RW 6. Dan variabel yang signifikan terhadap partisipasi pelanggan adalah pilihan individu, dan variabel yang tidak berpengaruh adalah pendidikan

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan desa yang semakin pesat dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis, akan tetapi desa sampai saat ini masih terbelakang dan miskin. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan desa adalah adanya bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Program tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang ada di desa tujuannya adalah meningkatkan kemudahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi agar lebih efektif dan efisien. Infrastruktur perdesaan dalam hal ini merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan pembangunan desa, karena jika kondisi infrastruktur perdesaan baik, maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat desa juga akan baik. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemeliharaan infrastruktur, maka akan menyebabkan masalah dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlunya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur perdesaan dan pelaksanaan PPIP secara berkelanjutan yaitu dengan bersedia membayar besarnya nilai WTP sebagai partisipasi masyarakat dalam bentuk uang untuk mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Berikut akan dijabarkan dalam gambar kerangka pemikiran teoritis pada Gambar 2.3.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian adalah objek pengamatan atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atau suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan masyarakat pedesaan dalam PPIP, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (Implementasi) dan pengawasan kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah program pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan dan pemeliharaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat melalui PPIP.
3. Intensitas partisipasi masyarakat
  - a. Curah Waktu merupakan waktu luang yang diberikan dari masyarakat untuk bergotong-royong memperbaiki infrastruktur pedesaan.
  - b. Swadaya merupakan suatu bentuk kontribusi secara sukarela dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

- c. Sosial adalah berhubungan dengan manusia dalam masyarakat sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong atau gotong-royong yang dilihat dalam sebuah organisasi
  - d. Moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia dalam tindakan yang memiliki nilai positif melalui proses sosialisasi atau berinteraksi antar sesama.
4. *Willigness to pay* (Kesediaan untuk membayar) masyarakat adalah kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Besarnya biaya estimasi diukur dalam satuan rupiah (Rp)
  5. Umur responden dalam penelitian ini adalah menunjukkan jumlah tahun hidup yang telah ditempuh oleh responden berdasarkan tahun kelahiran. Variabel ini diukur dengan menggunakan satuan tahun.
  6. Jenis Kelamin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan responden berdasarkan pada jenis kelaminnya yaitu perempuan dan laki-laki. Jenis Kelamin merupakan variabel deskriptif dengan ukuran nominal sehingga pengukurannya menggunakan variabel dummy, 0 = perempuan dan 1 = laki-laki.
  7. Tingkat pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang sedang ditempuh atau sudah ditempuh oleh responden. (SD/MI = 6 tahun, SMP/MTs = 9 tahun, SMA/MA = 12 tahun, Perguruan Tinggi (PT) = 16 tahun)

8. Tingkat pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih responden selama satu bulan. Penghasilan tidak hanya yang bersumber dari pekerjaan utama, akan tetapi penghasilan dari pekerjaan sampingan yang diperoleh responden. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dalam satuan rupiah (Rp).
9. Lama tinggal responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya individu menempati daerah penelitian. Variabel ini diukur dengan menggunakan satuan tahun.

### **3.2. Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga di Desa Kebumen dan Banyubiru di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

#### **3.2.2. Sampel**

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan karakteristik, sifat, ciri tertentu dari sampel yang dianggap dapat mewakili

karakteristik dari populasi yang ada, digunakan dalam pengambilan sampel sebagai *key-person*. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) teknik *Accidental Sampling* digunakan dalam pengambilan sampel sebagai responden yaitu kepala keluarga Desa Kebumen dan Banyubiru yang terlibat dalam kegiatan PPIP. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel penelitian bila orang tersebut cocok sebagai sumber data.

Objek penelitian ini adalah Desa Kebumen dan Banyubiru di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Menurut Sekaran (2006) ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan jumlah sampel responden ditentukan sebanyak 135 responden dengan rincian 125 responden warga masyarakat desa dan 10 responden *key person*. Berikut adalah rincian jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Rincian Jumlah Responden untuk 2 (dua) Desa Lokasi Penelitian**

No.	Desa	Populasi	Sampel	Banyak Responden/Desa (orang)
1.	Desa Kebumen	496	$\frac{496}{636} \times 125 = 97$	97
2.	Desa Banyubiru	140	$\frac{140}{636} \times 125 = 28$	28
	Jumlah	636	125	125

Sumber : Data primer, Diolah, 2014

**Tabel 3.2**  
**Rincian Jumlah Keyperson**

No	Jenis Keyperson	Banyak Keyperson (orang)	Total Keyperson
1.	Pemerintah kabupaten Semarang	2	2
2.	Fasilitator	2	2
3.	OMS	1	2
4.	Pebisnis	1	4
	Jumlah		10

Sumber : Data Primer, Diolah, 2014

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden yaitu masyarakat desa di Kecamatan Banyubiru dan responden *keyperson* yakni pihak-pihak yang dianggap memegang peranan penting dalam PPIP. Kuesioner yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang relevan sebagai informasi tambahan untuk mendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, majalah, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian, surat kabar, data statistik, dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi terkait meliputi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Semarang, dan Bappeda Kabupaten Semarang, serta penelusuran data melalui internet.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan responden baik melalui tatap muka atau lewat media telekomunikasi. Responden yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
  - a) Pemerintah dari Dinas Cipta Karya dan Bappeda
  - b) Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pemberdayaan
  - c) OMS di Desa Kebumen dan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang
  - d) Pebisnis di Desa Kebumen dan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang
  - e) Warga Masyarakat desa yang terlibat mengikuti kegiatan PPIP di Desa Kebumen dan Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.
2. Observasi adalah pengamatan yang melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau dan perasa). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dengan cara pengamatan langsung di daerah yang bersangkutan yaitu melihat kondisi infrastruktur

di Desa Kebumen dan Banyuwiru dan mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPIP di Desa Kebumen dan Banyuwiru.

3. Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumentasi tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku, jurnal serta laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini , yaitu : Dinas Cipta Karya Jawa Tengah, Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

### **3.5. Metode Analisis**

#### **3.5.1. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap PPIP**

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui persepsi para responden yaitu dengan analisis kuantitatif secara deskriptif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan penilaian terhadap perkembangan desa, aglomerasi, jiwa kewirausahaan, dan teknologi informasi pada saat sebelum dan sesudah PPIP yang berada di masing-masing desa di Kecamatan Banyuwiru. Penilaian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dengan menggunakan skala konvensional 1-10. Setelah itu untuk mengetahui persepsi sebelum dan sesudah PPIP, peneliti melakukan perhitungan terhadap hasil penilaian yang diperoleh dari responden. Untuk memudahkan pemahaman dilakukan pengelompokan nilai yaitu nilai 1-4 dikategorikan sangat tidak setuju/buruk, nilai 5-7 dikategorikan biasa-biasa saja/cukup, dan nilai 8-10 dikategorikan sangat setuju/bagus.

### 3.5.2. Analisis Intensitas Partisipasi Masyarakat

Analisis yang digunakan dalam mengukur intensitas partisipasi masyarakat dalam upaya mensukseskan PPIP menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi bagi pengambil keputusan (Mason et al, 1999). Dalam penelitian ini untuk melihat intensitas partisipasi masyarakat dalam mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan mengambil dua desa lokasi penelitian yaitu Desa Kebumen dan Banyubiru dan melakukan wawancara dengan masyarakat dan *keyperson* sebagai peran *stakeholders* dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PPIP dengan menggunakan skala konvensional (1-10). Untuk memudahkan pemahaman dilakukan pengelompokan nilai rata-rata dengan skala konvensional (1-10) sebagai berikut :

- Nilai 1 – 4 : Sangat Tidak Setuju / Buruk
- Nilai 5 – 7 : Biasa-biasa saja/ Cukup
- Nilai 8 – 10 : Sangat Setuju / Bagus

### 3.5.3. Analisis Besarnya Nilai WTP

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nilai WTP dari masyarakat dalam mensukseskan PPIP di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dianalisis dengan menggunakan pendekatan CVM (*Contingent Valuation Method*). Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan CVM dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan Hanley dan Splash (1993), adalah sebagai berikut:

1. Membangun Pasar Hipotetik (*Setting Up the Hypotetical Market*)

Pada awal proses kegiatan CVM peneliti harus terlebih dahulu membangun pasar hipotetik terhadap sumber daya yang akan dievaluasi dengan melakukan studi pustaka dan observasi ke lapangan. Dalam penelitian ini membangun pasar hipotetik yaitu dengan melakukan informasi kepada seluruh responden bahwa demi meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan yang telah dibangun melalui dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Banyubiru diperlukan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa berencana untuk membuat sistem retribusi pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan di setiap desa. Retribusi pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan adalah melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perdesaan diantaranya adalah jalan beton, jalan aspal dan talud yang telah dibangun melalui dana bantuan PPIP, agar setelah kegiatan PPIP selesai kondisi infrastruktur perdesaan tetap terawat dengan baik dan dapat mempermudah kegiatan masyarakat perdesaan. Selain itu, melalui retribusi tersebut masyarakat perdesaan dapat membangun infrastruktur perdesaan lainnya seperti irigasi dan sanitasi perdesaan.

Dalam sistem ini yang membedakan dengan sistem retribusi pemeliharaan sebelumnya adalah seluruh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan. Retribusi tidak hanya

diberlakukan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan roda empat (mobil dan truk) saja, akan tetapi semua masyarakat yang menggunakan jalan beton dan jalan aspal untuk kegiatan sehari-hari

Namun permasalahan yang muncul karena dana pemeliharaan yang dianggarkan oleh pemerintah tidak cukup untuk biaya pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat nantinya yang akan menikmati infrastruktur perdesaan tersebut, sehingga dapat ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan keberlanjutan PPIP dengan memberikan pembayaran atau retribusi tiap kepala keluarga setiap bulan selama setahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perdesaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kualitas infrastruktur perdesaan yang lebih baik.

## 2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTP (*Obtaining Bids*)

Metode yang digunakan dalam mendapatkan nilai penawaran pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode tawar menawar (*bidding game*) yaitu metode yang menawarkan beberapa bilangan yang disarankan kepada responden. Metode ini dilaksanakan dengan menanyakan kepada responden apakah bersedia membayar sejumlah uang tertentu yang diajukan sebagai titik awal (*starting point*). Jika “ya”, maka besarnya nilai uang dinaikan sampai ke tingkat yang disepakati. Dalam mendapatkan angka *bid* atau tawaran tersebut terlebih dahulu membuat estimasi biaya investasi dalam beberapa skenario untuk mengetahui biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan. Untuk mencari estimasi biaya dan

skenario, dalam penelitian ini berkonsultasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang dan Fasilitator Teknik sebagai panel ahli dalam bidang infrastruktur.

Setelah mendapatkan informasi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Semarang dan Fasilitator Teknik, dapat dibuat estimasi untuk pemeliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk mendapatkan nilai yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

### 3. Menghitung Dugaan Rata-rata Nilai WTP (*Estimating Mean WTP*)

Dalam menghitung nilai dugaan rata-rata WTP yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata dari penjumlahan keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden. Dugaan rata-rata WTP dihitung dengan rumus :

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n}$$

Dimana:

EWTP : Dugaan rata-rata WTP

$W_i$  : Nilai WTP ke- $i$

$n$  : Jumlah responden

$i$  : Responden ke- $i$  yang bersedia membayar ( $i=1,2,3,\dots,n$ )

### 4. Menjumlahkan Data (*Agregating Data*)

Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran rata-rata dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai tengah WTP maka dapat diduga nilai total WTP dari masyarakat dengan menggunakan rumus :

$$TWTP = \sum_{i=1}^n WTP_i n_i$$

Dimana :

TWTP : Total WTP

$WTP_i$  : WTP individu sampel ke- $i$

$n_i$  : Jumlah sampel ke- $i$  yang bersedia membayar sebesar WTP

$i$  : Responden ke- $i$  yang bersedia membayar ( $i=1,2,3,\dots,n$ )

Dalam analisis CVM peneliti membuat ilustrasi dalam bentuk cerita agar responden lebih jelas dalam memahami tahapan CVM dalam menentukan besarnya nilai WTP yang diberlakukan untuk pemeliharaan dan pelaksanaan PPIP secara berkelanjutan, ilustrasi tersebut dapat dilihat pada halaman Lampiran C dalam penelitian ini.